



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI HARYANTI
2. Jabatan : PRANATA KOMPUTER MUDA
3. NHK : 143906

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	495.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/30 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/50 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	127.500.000
1. MOBIL, DAIHATSU LUXIO MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. MOTOR, VARIO 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.678.384
F. HARTA LAINNYA	Rp.	30.000.000
Sub Total	Rp.	668.178.384
III. HUTANG	Rp.	68.440.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	599.738.384

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.